

BAB II

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS SEBAGAI REZIM GLOBAL

Obyek penelitian pada skripsi ini, yaitu Millennium Development Goals (MDGs) akan dibahas dalam bab dua. Pembahasan ini terdiri dari MDGs secara umum dan sejarahnya, MDGs di Indonesia serta Tujuan, Target dan Indikator MDGs di Indonesia. Obyek spesifik penelitian ini yang terdiri tujuan MDGs yang ke-tujuh yaitu menjamin daya dukung lingkungan hidup juga akan dibahas detail dalam bab ini.

Adanya suatu rezim merupakan sebuah cermin pola kerjasama. Kerjasama internasional merupakan suatu proses dimana kebijakan aktor atau pemerintah dianggap sebagai sebuah bentuk yang menjadi alasan realisasi dari pencapaian tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Dimana terdapat *cooperation* dan usaha penyesuaian sebagai sebuah kelanjutan dari adanya koordinasi. Keduanya muncul tidak sendirinya, melainkan hanya timbul ketika terdapat konflik atau perbedaan. Sehingga jelas berbeda dengan harmoni yang lahir tanpa perlu melewati sebuah proses konflik.

Terkait dengan adanya sudut pandang teori, rezim terdiri dari berbagai pola atau tingkatan order, mulai dari prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Rezim bisa dipandang sebagai suatu faktor ataupun variabel intervensi. Dimana untuk memahami dampak dari adanya sebuah rezim dapat dilihat dari adanya prinsip, norma, dan aturan yang memiliki pengaruh terhadap pola perilaku aktor, seperti misalnya adalah pola perilaku penyesuaian,

dimana hal itu terjadi karena adanya rezim dan terkait dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh para aktor.

A. MDGs dan sejarahnya

Millenium Development Goals (disingkat MDGs) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). Tujuan Pembangunan Milenium merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000 silam. Majelis Umum PBB kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 Tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹

Lahirnya Deklarasi Milenium merupakan buah perjuangan panjang negara-negara berkembang dan sebagian negara maju. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia, yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi, dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Deklarasi MDGs tidak bertentangan dengan deklarasi-deklarasi yang pernah ada sebelumnya. Negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi MDGs. Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target berikut indikatornya. MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan serta memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur yang mana menjadi acuan apakah program MDGs tersebut tercapai atau tidak.

¹ Tim Penyusun MDGs Indonesia. (2007). *Laporan Pencapaian Millennium Development Goals 2007*. Jakarta: Bappenas hal.3

Ada beberapa tujuan pembangunan yang lain ditetapkan pada dekade 1960-an hingga 1980-an. Sebagian terlahir dari konferensi global yang diselenggarakan PBB pada 1990-an, termasuk KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copenhagen. MDGs tidak bertentangan dengan komitmen global yang sebelumnya karena sebagian dari MDG itu telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Internasional (IDG), oleh negara-negara maju yang tergabung dalam OECD pada 1996 hingga selanjutnya diadopsi oleh PBB, Bank Dunia dan IMF. Sekalipun MDGs merupakan sebuah komitmen global tetapi diupayakan untuk lebih mengakomodasikan nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan.

MDGs tidak sama seperti halnya kesepakatan-kesepakatan lainnya. MDGs dapat digunakan sebagai alat untuk menyamakan persepsi tentang pembangunan supaya dapat meningkatkan upaya kerjasama global dan kedaulatan masing-masing negara terhadap masyarakatnya. MDGs merupakan arahan untuk mencapai pembangunan millenium yang wajib dicapai dan dilaksanakan. MDGs juga menjadi tolak ukur bagi proses transisi dari sebuah negara berkembang menjadi negara maju.

MDGs didasarkan atas konsensus dan kemitraan global, sambil menekankan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut.

Dikotomi orientasi pembangunan antara pertumbuhan dan pemerataan, sebagaimana diketahui, sudah berlangsung sejak lama. Akan tetapi berbagai kajian ilmiah membuktikan bahwa pembangunan yang menekankan pada pemerataan lebih berdampak positif. Nilai positif ini setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yaitu: *Pertama*, bahwa orientasi pembangunan yang menekankan pada pemerataan akan mengangkat kesejahteraan penduduk secara lebih luas. Dengan begitu, lebih banyak penduduk yang dapat menikmati hasil pembangunan. *Kedua*, secara timbal balik, karena semakin banyaknya penduduk yang kesejahteraannya meningkat, pada gilirannya akan lebih banyak lagi sumberdaya manusia yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian keberlanjutan pembangunan menjadi lebih pasti. Sebaliknya orientasi pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan akan lebih menghasilkan kesenjangan dalam masyarakat.²

Dengan begitu, MDGs menjadi tanggungjawab setiap negara, baik negara berkembang sebagai penggerak dalam memenuhi target MDGs dan negara maju berkewajiban mendukung upaya yang dilakukan oleh negara berkembang seperti untuk masalah pendanaan maupun untuk kemitraan lainnya. MDGs memberikan dampak positif kepada negara anggota PBB, di mana dengan adanya deklarasi MDGs mendorong ssetiap negara untuk mencapai kedelapan dari tujuan MDGs tersebut.

Pada dekade 1980-an banyak kelompok studi yang mendiskusikan orientasi pembangunan "*Growth*" versus "*Development*" tersebut. Salah satu yang

² Ibid hal.3

dapat disebutkan di sini adalah “Club of Rome”, kelompok yang kemudian mengemukakan argumen tentang “*Limit to Growth*”. Selanjutnya pada dekade 1990-an, PBB membawa isu orientasi pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan umat manusia tersebut (*development*) ke dalam pembahasan, diskusi, serta kesepakatan antarnegara. Tahun 1992, misalnya, diselenggarakan KTT Bumi di Rio de Janeiro. Tahun 1994 digelar pula Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Cairo. Tahun 1995, ganti Konferensi Gender dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan, berikut beberapa konferensi lainnya yang sejalan setelah itu.³

Puncak dari upaya mengedepankan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang, adalah lahirnya kesepakatan kepala negara dan kepala pemerintahan 189 negara mengenai Deklarasi Milenium. Deklarasi ini berisi kesepakatan negara-negara tentang arah pembangunan berikut sasaran-sasarannya yang perlu diwujudkan. Secara ringkas, arah pembangunan yang disepakati secara global meliputi: (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan maternal; (6) melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa); (7) menjamin keberlangsungan lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

³ Ibid hal.3

Di sini dapat disimpulkan bahwa, MDGs menyempurnakan konferensi-konferensi yang pernah ada sebelumnya. MDGs merupakan perpaduan antara upaya mengedepankan pembangunan dan perekonomian negara. Target dari MDGs tersebut tidak hanya berorientasi untuk generasi saat ini saja, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

B. MDGs di Indonesia

Perkembangan pencapaian MDGs sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Sebagai sebuah bentuk orientasi pembangunan, MDGs dalam tataran implementasi sesungguhnya telah dipraktekkan oleh Pemerintah Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Megawati Sukarnoputri, dalam berbagai bentuk kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi masa itu.

Semenjak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami tiga masa pemerintahan, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pada masa Orde Lama, Secara formal pemerintah Indonesia baru menerima kedaulatan dari Belanda pada akhir 1949. Lima belas tahun pertama kemerdekaan Indonesia diwarnai ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi. Republik Indonesia yang liberal didirikan pada 1950, bercirikan seringnya terjadi perubahan kabinet, ketegangan di beberapa daerah, dan kesulitan dalam masalah ekonomi. Setelah 1965, keadaan terus memburuk hingga terjadi peristiwa G30S/PKI pada 1965.

Pada masa Presiden Soekarno, Pemerintah menerbitkan dokumen perencanaan pembangunan yang diberi nama Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 dan Pokok-pokok Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969. Merujuk pada dua dokumen pembangunan tersebut, diketahui bahwasanya Indonesia waktu itu telah mencoba menangani persoalan pembangunan milenium. Ini ditunjukkan, antara lain, pada kurun 1956-1960 ketika pembangunan nasional berorientasi pada peningkatan pendapatan nasional yang membentuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kemakmuran rakyat diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan sehingga dapat berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga secara mandiri. Bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan mendapatkan perhatian khusus. Kemudian, antara tahun 1961-1969, perhatian ditumpukan pada peningkatan pendapatan nasional dan perseorangan hingga yang harus tercapai pada akhir pelaksanaan pembangunan. Peningkatan kualitas penduduk diselenggarakan lewat pembangunan kemasyarakatan, pendidikan, dan kesejahteraan, yang tertuang dalam dokumen Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun. Terlihat bahwa peningkatan kualitas manusia telah menjadi komitmen dan program yang dilakukan jauh sebelum MDGs disepakati sebagai komitmen global. Sayangnya, pelaksanaan program tersebut terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965.⁴

Sebelum deklarasi MDGs dideklarasikan oleh PBB dan disepakati oleh 189 kepala negara, Indonesia telah mengupayakan adanya pembangunan

⁴ Ibid hal.4

milenium yang berorientasi kepada pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional tersebut diwujudkan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan.

Pada masa Orde Baru pada tahun 1966 pemerintahan diambil alih oleh Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden pada 1967 dan berkuasa sepanjang masa Orde Baru, yaitu selama enam periode berikutnya. Pemerintah Orde Baru sangat menekankan stabilitas dan penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada setiap periodenya. Namun, pembangunan ekonomi yang berhasil tidak dibarengi dengan partisipasi politik, perwujudan HAM, keadilan, dan transparansi pembuatan keputusan publik. Pada masa ini transaksi keuangan sering diwarnai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada akhirnya penolakan atas rezim Orde Baru meningkat dan menemukan momentumnya ketika Krisis Ekonomi 1997.

Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan kembali program-program peningkatan kesejahteraan yang meliputi pendidikan, kesehatan perorangan, kesehatan reproduksi, dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I-IV, yang ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Pada Repelita V-VI, pemerintah melaksanakan program-program yang selaras dengan MDGs saat ini, dengan orientasi menuntaskan masalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Jalur pembangunan yang ditempuh adalah dengan menyinergikan program reguler sektoral dan regional. Pelaksanaan Repelita V-VI ini pun terpaksa terhenti saat

Indonesia menderita akibat dampak krisis ekonomi dan politik yang hebat di tahun 1997.⁵ Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah kembali melanjutkan program-program yang selaras dengan MDGs yang mana mencakupi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan maupunkesehatan reproduksi. Pada masa orde baru pemerintah meningkatkan ke arah pembangunan ekonomi. Tetapi sangat disayangkan karena pada masa orde baru hanya memfokuskan kepada nilai pembangunan ekonomi saja. Pembangunan ekonomi tersebut berhasil tetapi tidak dibarengi dengan transparansi kinerja pemerintah seperti dalam hal politik, pembuatan kebijakan publik, dan malah sering terjadi nya KKN. Pada akhirnya terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mendorong rakyat meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri.

Semenjak 1998 Indonesia memasuki era reformasi di mana masa penuh perubahan politik, ekonomi, dan sosial, dan memasuki cara pemerintahan yang lebih demokratis. Sampai sekarang telah terjadi tiga kali pergantian pemerintahan dan banyak sekali partai politik. Reformasi ini meliputi juga penguatan dan pembentukan lembaga baru yang mendukung *governance* yang lebih demokratis dan efektif, dengan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pelaksanaan fungsi pemerintah. Reformasi konstitusi telah memperkenalkan sistim perwakilan yang lebih adil dalam bidang legislatif dan mulai 2004 rakyatlah, bukan anggota MPR, yang akan memilih kepala pemerintahan secara langsung.

⁵ Ibid hal.4

Menjelang berakhirnya abad ke-20, Indonesia mulai menapaki masa transisi. Kebijakan pembangunan selama kurun itu, antara tahun 1998-2000, bersifat transisi pula. Salah satu kebijakan yang selaras dengan MDGs adalah pelaksanaan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang diantaranya adalah JPS bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan selama 40 tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia telah konsisten dengan tujuan MDGs, meskipun MDGs sendiri saat itu belum menjadi agenda pembangunan global. Pada tahun 2004, Indonesia menerbitkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 yang diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun sejak tahun 2004 hingga tahun 2008.⁶

Secara umum, pencapaian pembangunan manusia yang berhubungan dengan tujuan MDGs pertama hingga kedelapan telah menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan penyusunan dokumen sejak awal kemerdekaan Indonesia baik yang tertuang di dalam dokumen RPJMN tahun 2004-2009 maupun dokumen-dokumen RKP. Dokumen-dokumen tersebut secara khusus juga mengukur dan menelaah kemajuan pencapaian yang diperoleh, termasuk mengenali tantangan dan mengkaji program serta kebijakan ke depan untuk mencapai sasaran MDGs.

Walaupun permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia masih cukup banyak, Pemerintah Indonesia telah

⁶ Ibid hal.4

bertekad untuk memenuhi komitmen pencapaian target MDGs pada 2015 mendatang. Bahkan, penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan jangka menengah (RPJMN) ditargetkan lebih cepat daripada target MDGs sendiri. MDGs telah menjadi salah satu bahan masukan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Upaya dialog dengan berbagai pihak akan terus diupayakan untuk mencari kesepakatan dan langkah kerjasama kongkrit di masa yang akan datang. Hal ini penting dilakukan, mengingat pencapaian MDGs akan lebih mudah dicapai melalui dukungan dan partisipasi aktif dari swasta dan masyarakat.

Dengan pertimbangan bahwasanya sumber pendanaan dalam negeri masih belum sepenuhnya mencukupi untuk membiayai pembangunan, Pemerintah hingga kini masih memerlukan dukungan internasional bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, Pemerintah berupaya terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama pembangunan melalui penyusunan strategi pengelolaan utang luar negeri, penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan harmonisasi pelaksanaan kerjasama internasional secara keseluruhan.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga akan terus mendukung upaya mempererat pelaksanaan kerjasama regional Asia Pasifik. Kerjasama ekonomi dan perdagangan antarnegara di Asia Pasifik memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, demi meningkatkan kemampuan masing-masing negara dalam rangka mencapai MDGs di kawasan, serta meningkatkan posisi tawar bersama di lingkungan global.

C. Tujuan, Target dan Indikator MDGs Indonesia

Dalam deklarasi millennium terdapat delapan tujuan pembangunan millennium beserta target dan indikatornya masing-masing, dilengkapi dengan variabel pendukung lainnya yang merupakan komitmen dari komunitas internasional terhadap perkembangan visi mengenai pembangunan, yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai penegembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kemitraan global. Tujuan tersebut wajib sudah tercapai pada 2015.

Tujuan, target dan indikator MDGs di Indonesia terangkum sebagai berikut:⁷

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Target 1 Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US\$1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015

Indikator:

1. Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah US\$1 (PPP) per hari.
2. Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional.
3. Indeks kedalaman kemiskinan.
4. Indeks keparahan kemiskinan.
5. Proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil pertama).

⁷ Ibid hal.6

Target 2 Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015

Indikator :

6. Persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk (*severe underweight*).
7. Persentase anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (*moderate underweight*).

Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 3 Menjamin pada tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Indikator :

8. Angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (7-12 tahun).
9. Angka partisipasi murni (APM), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (13-15 tahun).
10. Angka melek huruf usia 15-24 tahun.

Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 4 Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

Indikator :

11. Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki (%).
12. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (indeks paritas melek huruf gender) (%).
13. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan (%).
14. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan (%).
15. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan (%).
16. Tingkat daya beli (*Purchasing Power Parity*, PPP) pada kelompok perempuan (%).
17. Proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) (%).

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 5 Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya dalam kurun waktu 1990 – 2015.

Indikator :

18. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
19. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 kelahiran hidup.
20. Anak usia 12-23 bulan yang diimunisasi campak (%).

Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 6 Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990 – 2015.

Indikator :

21. Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup.
22. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%).
23. Proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan atau memakai alat keluarga berencana (%).

Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

Target 7 Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015.

Indikator :

24. Prevalensi HIV dan AIDS (%).
25. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi (%).
26. Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi (%).
27. Persentase penduduk usia muda 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%).

Target 8 Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015.

Indikator :

28. Prevalensi malaria per 1.000 penduduk.

29. Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk.
30. Angka penemuan pasien tuberkulosis BTA positif baru (%).
31. Angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis (%).

Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 9 Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.

Indikator :

32. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan Satelit Landsat terhadap luas daratan (%).
33. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan, kawasan lindung, dan kawasan konservasi termasuk kawasan perkebunan dan hutan rakyat terhadap luas daratan (%).
34. Rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan (%).
35. Rasio luas kawasan lindung perairan (*marine protected area*) terhadap luas daratan (%).
36. Jumlah emisi karbondioksida (CO₂) (metrik ton).
37. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) (ton).
38. Rasio jumlah emisi karbondioksida (CO₂) terhadap jumlah penduduk Indonesia (%).
39. Jumlah penggunaan energi dari berbagai jenis (setara barel minyak, SBM), (a) Fosil dan (b) Non-fosil.

40. Rasio penggunaan energi (total) dari berbagai jenis terhadap Produk Domestik Bruto (%).

41. Penggunaan energi dari berbagai jenis secara absolut (metrik ton).

Target 10 Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015.

Indikator :

42. Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total) (%)

43. Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perdesaan) (%)

44. Proporsi rumah tangga/penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perkotaan) (%)

45. Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK)

46. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total) (%)

47. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perdesaan) (%)

48. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perkotaan) (%)

Target 11 Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020.

Indikator :

49. Proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah (%).

Tujuan 8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

Target 12 Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.

Indikator :

50. Rasio antara jumlah Ekspor dan Impor dengan PDB (%).

51. Rasio antara Kredit dan Tabungan (LDR) Bank Umum (%).

52. Rasio antara Kredit dan Tabungan (LDR) Bank Perkreditan Rakyat(%).

Target 15 Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Indikator :

53. Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB.

54. *Debt-to-Service Ratio* (DSR).

Target 16 Bekerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda.

Indikator :

55. Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun);

56. Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) menurut jenis kelamin;

57. Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) menurut provinsi.

Target 18 Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Indikator :

58. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon selular.

59. Persentase rumah tangga yang memiliki komputer personal dan mengakses internet melalui komputer.

MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan secara obyektif dengan indikator yang sebagian besar secara internasional dapat diperbandingkan. Tujuan-tujuan dalam MDG saling terkait satu dengan yang lain. Misalnya, Tujuan 1 yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan yang parah, adalah kondisi yang perlu tapi belum cukup bagi pencapaian tujuan 2 hingga tujuan 7. Demikian juga, tanpa kemitraan dan kerja sama antara negara miskin dan negara maju, seperti yang disebut pada Tujuan 8, negara-negara miskin akan sulit mewujudkan ketujuh tujuan lainnya. Delapan belas target dan lebih dari 40 indikator terkait ditetapkan untuk dapat dicapai dalam jangka waktu 25 tahun antara 1990 dan 2015. Masing-masing indikator digunakan untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap tujuan dan target.

D. Proses Ratifikasi Millennium Development Goals (MDGs) di Indonesia

MDGs yang diformulasikan secara bersama pada tingkat global, dalam beberapa aspek bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pencapaian tujuan MDGs sebagian besar berada di pundak pemerintah, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Pencapaian MDGs akan sangat sulit apabila hanya mengandalkan komitmen Pemerintah Pusat. Terbentuknya komitmen Pemerintah Pusat bersama pihak Pemerintah Daerah dan perangkatnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), masyarakat, organisasi sosial masyarakat, media dan anggota pemangku kepentingan yang lain di daerah akan sangat membantu pencapaian MDGs. Hal ini mengingat bahwa proses perencanaan dan pemangku daerah mengharuskan adanya partisipasi dari pemangku-pemangku kepentingan tersebut. Dengan demikian, peran semua komponen pemangku kepentingan di pusat dan daerah perlu diberdayakan untuk menempatkan pencapaian MDGs sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Untuk memenuhi target MDGs di tahun 2015, maka indikator dari delapan tujuan MDGs harus diintegrasikan dalam Rencana Kerja Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah. Jika pemerintah daerah mengintegrasikan indikator-indikator seperti meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan angka

partisipasi murni, menurunkan angka melek huruf dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk maka dengan sendirinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat dan target MDGs dapat tercapai di tahun 2015.

Seiring dengan berjalannya desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang secara langsung mempengaruhi pencapaian MDGs menjadi semakin besar. Sebagai implikasinya, peran kebijakan dan anggaran daerah dalam pencapaian MDGs perlu diperluas. Melihat pentingnya peranan pemerintah daerah dalam pencapaian target-target MDGs, pencapaian indikator MDGs perlu diintegrasikan sebagai bagian dari indikator target, keluaran (output), hasil(outcome), dari proses perencanaan dan penganggaran di daerah.⁸

Peran kebijakan pemerintah daerah dalam pencapaian target MDGs juga dapat bersifat komplementer terhadap program pemerintah pusat. Misalnya untuk mencapai target pengurangan kemiskinan, Pemda dapat mengkombinasikan program-program nasional seperti PNPM atau Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, Pemda dapat memperluas cakupan peserta program atau melaksanakan kegiatan yang bersifat komplementer. Sebagai contoh, jika dalam PNPM dibangun infrastruktur jalan pertanian atau jalan desa, maka pemerintah daerah dapat berperan dengan memperluas jaringan jalan antardesa atau antar kecamatan agar akses pasar penduduk miskin dapat di perluas. Selain meningkatkan peran

⁸ Konawe, T. P. (2007). *Laporan MDGs Kabupaten Konawe*. Pemerintah Kabupaten Konawe hal.1

pemerintah, kebijakan lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian target MDGs di tingkat daerah adalah memberikan perhatian khusus kepada provinsi-provinsi yang relatif tertinggal. Kecuali Papua, daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang rendah sumber daya fiskalnya.

E. MDGs Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup

Obyek spesifik dalam penelitian ini akan membahas tujuan ke-tujuh dari program MDGs yaitu menjamin daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan laporan pencapaian MDGs pada tahun 2010, tujuan MDGs yang ke-tujuh ini mempunyai 4 target yang harus dicapai sebelum tahun 2015.

- a) Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.

Target 7A dalam menjamin daya dukung lingkungan hidup, mengarah kepada pembangunan negara yang diikuti dengan menjaga kelestarian lingkungan serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang telah hilang. Indikator pencapaian program MDGs menitik pada target ini menitik beratkan kepada rasio luas kawasan yang tertutupi oleh pepohonan, rasio kawasan hutan lindung, jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan, jumlah energi yang digunakan (setara barel minyak) per PDB (juta rupiah), Jumlah konsumsi zat perusak ozon (metrik ton). Dan juga proposi tangkapan ikan berada dalam batasan biologis yang aman.

Kawasan lindung yang dimaksud dapat berupa kawasan konservasi dan lindung. Kawasan konservasi meliputi kawasan konservasi daratan dan perairan

yang terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. Termasuk di dalam kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Dengan mengacu pada definisi yang digunakan secara internasional mengenai kawasan lindung, keenam tipe kawasan konservasi itu dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu sepenuhnya dilindungi atau *totally-protected area* (cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasional) dan sebagian dilindungi atau *partially-protected area* (taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru). Perlindungan terhadap kawasan lindung ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya dan menjaga kelangsungan fungsi ekologis kawasan terhadap lingkungan dalam lingkup luas.

- b) Mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan yang signifikan pada 2015.

Dalam target yang sebelumnya, salah satu indikator keberhasilannya adalah perlindungan kawasan lindung yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi keanekaragaman hayati yang kaya di tingkat ekosistem, spesis dan genetik. Dalam hal ekosistem, beragam tipe ekosistem dapat ditemukan di Indonesia; dari puncak salju di Jayawijaya, alpin, sub-alpin, gunung sampai hutan hujan tropis dataran rendah (Sumatera, Kalimantan), hutan pantai, padang rumput, sabana (Nusa Tenggara), lahan basah, muara, dan ekosistem bakau, pesisir, dan laut, termasuk padang lamun (Selat Sunda) dan terumbu karang (Bunaken), sampai dengan ekosistem laut dalam. Beragam ekosistem ini merupakan habitat bagi jenis flora

dan fauna yang sangat beragam, yang sebagian merupakan spesies endemik (hanya ditemukan di daerah tertentu). Sekitar 515 spesies mamalia, 511 spesies reptil, 1.531 jenis burung, 270 jenis amfibi, dan 2.827 jenis invertebrata telah ditemukan di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 38.000 spesies tumbuhan, di mana kurang lebih 477 di antaranya merupakan jenis tanaman palem dan 350 jenis pohon penghasil kayu.

Upaya-upaya koneservasi terus menerus dilakukan untuk menahan laju kehilangan keanekaragaman hayati lebih banyak lagi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati harus menjaga kelestarian lingkungan, mengingat tidak semua sumber daya alam itu bisa diperbaharui lagi. Contohnya adalah puncak salju di Jayawijaya. Salju yang menutupi pegunungan Puncak Jaya mulai menyusut beberapa tahun terakhir. Dari hasil citra satelit menunjukkan luasan es di pegunungan itu telah hilang sekitar 80 persen sejak 1936 atau dua pertiga dari ekspedisi ilmiah terakhir yang dilakukan di tempat itu pada awal 1970. Jika hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus, tidak mengherankan apabila generasi penerus kita tidak akan bisa melihat lagi salju di Indonesia.

- c) Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002, definisi air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Definisi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

Di Indonesia, cakupannya bervariasi tergantung definisi yang digunakan:⁹

1. Persentase rumah tangga yang menggunakan air perpipaan, dengan asumsi lebih andal (*reliable*) dan lebih sehat dibandingkan dengan sumber air lainnya.
2. Persentase penduduk yang menggunakan air dari sumber yang terlindungi dengan jarak lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan tinja. Sumber-sumber ini meliputi: air perpipaan, air pompa, air kemasan, air dari sumur atau mata air yang dilindungi, dan air hujan.
3. Persentase rumah tangga yang menggunakan air dari sumber yang terlindungi seperti didefinisikan di atas tanpa memperhitungkan jarak dari tempat pembuangan tinja. Air menurut definisi ini kemungkinan besar akan terkontaminasi.

Indonesia masih memiliki cakupan pelayanan air perpipaan yang sangat rendah dan proses ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Target proposi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan layak ini mencakup untuk perkotaan dan perdesaan.

Selain sarana akses masyarakat terhadap sumber air minum yang bersih, target yang ke-2 ini juga membahas aksesibilitas masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar masyarakat (rumah tangga) terhadap sarana jamban, baik jamban pribadi, jamban bersama, ataupun jamban umum.

- d) Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020.

⁹ Tim Penyusun MDGs Indonesia. (2007), *op.cit*

Dalam dokumen pedoman MDGs *Indicators for Monitoring the Millennium Developments*, *secure tenure* didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah baik secara pribadi maupun kelompok. Target yang ke-3 ini membahas rendahnya tingkat kepemilikan rumah, tingginya rumah yang tidak layak huni dan meningkatnya luas kawasan kumuh.

Dalam bab 2 ini bisa disimpulkan bahwa, MDGs sebagai sebuah deklarasi milenium yang disepakati oleh 189 kepala negara menyempurnakan konferensi-konferensi yang pernah ada sebelumnya. MDGs merupakan perpaduan antara upaya mengedepankan pembangunan dan perekonomian negara. Target dari MDGs tersebut tidak hanya berorientasi untuk generasi saat ini saja, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Perkembangan pencapaian MDGs sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Sebagai sebuah bentuk orientasi pembangunan, MDGs dalam tataran implementasi sesungguhnya telah dipraktekkan oleh Pemerintah Indonesia sejak masa Pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Megawati Sukarnoputri, dalam berbagai bentuk kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi masa itu.

Dalam deklarasi millennium terdapat delapan tujuan pembangunan millennium beserta target dan indikatornya masing-masing, dilengkapi dengan variabel pendukung lainnya yang merupakan komitmen dari komunitas internasional terhadap perkembangan visi mengenai pembangunan, yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan

mengembangkan kemitraan global. Tujuan-tujuan dalam MDG saling terkait satu dengan yang lain. Dalam upaya menjamin daya dukung lingkungan hidup, terdapat empat target yang harus dicapai oleh Indonesia agar tujuan MDGs yang ke-tujuh ini mencapai target yang diharapkan.